

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari kinerja instansi pemerintah. Isu tentang kinerja instansi pemerintah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan rakyat. Rakyat menuntut pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pewujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertera tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini. (Auditya.2013).

Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolak ukur penilaian kinerja instansi pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Kosekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab (akuntability)

dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan dan kinerja yang dihasilkan. (Waliyati dalam Riantiarno 2011).

Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good govermance* yang diterjemahkan “Tata kelola pemerinthan yang baik” yang saat ini sedang menjadi tantangan bagi semua sektor pada jajaran pemerintah Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat. (Yuanida, Metika;2010).

Meluasnya praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng *image* masyarakat terhadap birkrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang respomsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah (Martha, Widya;2014)

Pengertian kinerja sendiri yaitu gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah (Ulum, Ihyaul;2009). Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu media untuk melaporkan keberhasilan atau

kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Kinerja merupakan pencapaian kerja atas rencana kerja yang ditetapkan dan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Kinerja instansi pemerintah sebagai pendorong usaha penyempurna struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintah yang berkelanjutan. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. (Menurut Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 35 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Fenomena terkait kinerja pemerintah daerah Kab. Bandung barat yang penulis kutip dari Tribun Jabar yaitu pemerintah Kab. Bandung Barat mendapatkan nilai CC dari KEMENPAN. Kab. Bandung barat mendapat penilaian CC, untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemenpan RB). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintah KBB atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. Dalam penilaian 5 komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni perencanaan kerja yang bobotnya 35, pengukuran kerja 20 bobot, pelaporan kerja 15 bobot, evaluasi kerja hanya 10 bobot dan pencapaian kinerja yang hanya 20 bobot. Namun dengan demikian

KBB hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65. Dari skor yang diraih yang hanya berbobot 50-65, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada perencanaan kerja yang selalu copy paste setiap tahunnya dan kurang selaras dengan Visi Misi Bupati. Kemudian kekurangan Pemkab KBB terletak pada ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.

(<http://jabar.tribunnews.com/2017/01/26/kbb-dapat-nilai-cc-kinerja-pemerintah-dinilai-mengecewakan>)

Menurut kebijakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan kategori LAKIP sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Tabel 1.1 Kategori penilaian LAKIP

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk

menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim,2006)

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shade dan Bannet, 2004).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP)

Masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik pemerintah maupun pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu di Kabupaten Bandung Barat yang penulis kutip dari detik *news* yaitu BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten kota. Hasilnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). penyerahan LHP LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Persoalan yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian.

<https://news.detik.com/jawabarat/4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp>

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kab. Bandung Barat dinilai kurang maksimal sehingga tujuan dari pemerintah Kab.

Bandung barat belum tercapai beberapa contohnya kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, tingginya angka kemiskinan, masih banyaknya perencanaan yang belum selesai, ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, dan ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran serta ditemukan persoalan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan oleh karena itu berdampak pada penilaian dari Kemenpan-RB yang mendapatkan nilai CC dan mendapatkan opini WDP untuk laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk pemerintah Kab. Bandung barat.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2014).

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhann pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari pelaksanaan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016:20).

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik sebagai perwujudan *good governance* khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, tidak terlepas dari sistem pengawasan yang baik., bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat sebagai Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) dan mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Wiguna et al., (2015).

Pengawasan khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan menerapkan prinsip *good governance* meliputi antara lain *transparency, responsiveness, consessus orientation, equity, efficiency, dan effectiveness*, serta *accountability* (Mardiasmo, 2006).

Penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marina Macori Ludani yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) dan dilakukan penelitian oleh Fitfit Purnama yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan keuangan dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Survey pada SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan, penulisan membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Pengawasan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Pengawasan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai pengaruh pengendalian keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kinerja instansi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar memiliki pengendalian keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendaian Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kinerja Instansi Pemerintah (survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan ,acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Pengendaian Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

pada Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada sembilan belas SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yaitu :

1. Dinas kearsipan dan perpustakaan
2. Dinas kepemudaan dan olahraga
3. Dinas kependudukan dan catatan sipil
4. Dinas kesehatan
5. Dinas komunikasi informatika dan statistika
6. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah
7. Dinas lingkungan hidup
8. Dinas pariwisata dan kebudayaan
9. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
10. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
11. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
12. Dinas pendidikan
13. Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
14. Dinas perhubungan
15. Dinas perikanan dan peternakan
16. Dinas perindustrian dan perdagangan

- 17. Dinas pertanian dan ketahanan pangan
- 18. Dinas social
- 19. Dinas tenaga kerja transmigrasi
- 20. Dinas perumahan dan pemukiman